



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Surabaya Nomor : 100.3.2/20076/436.1.2/2023 tanggal 15 September 2023 Perihal : Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 900.1.1/3432/436.5/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Perihal : Pemberitahuan;

3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 100.3.2/3937/436.5/2023 tanggal 14 September 2023 Perihal : Pemberitahuan;

4. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 259/KOM.C/IX/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;

5. Surat Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 12/BPP/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Perihal : Usulan Judul Propemperda Tahun 2024;

6. Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya tanggal 02 November 2023;

7. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.1/42461/013.2/2023 tanggal 7 November 2023 Hal : Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal**

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**

Ttd.

LAILA MUFIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**



**Ir. Musdiq Ali Suhudi, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199403 1 006**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD SURABAYA
 NOMOR : 41 TAHUN 2023
 TANGGAL : 9 NOVEMBER 2023

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA TAHUN 2024

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		V					1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama; 3. BPJS Ketenagakerjaan	BPP
2.	Perlindungan Masyarakat dalam Kepemilikan Rumah dan/atau Rumah Susun		V					1. Bagian Hukum dan Kerjasama; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 3. Dinas Lingkungan Hidup;	BPP

3.	Perlindungan Perempuan		V					1. Bagian Hukum dan Kerjasama; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Kesehatan	BPP
4.	Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya							1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP); 2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan; 4. Bagian Hukum dan Kerjasama	BPP
5.	Pariwisata							Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.	Komisi A
6.	Pemanfaatan lahan kosong milik Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Masyarakat							1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP); 2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Komisi B -

7.	Pengelolaan Sampah Permukiman							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan	Komisi C
8.	Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas							1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Sosial	Komisi D
9.	Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat							1. Bakesbangpol; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama	BPP
10.	Energi Biru							1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	BPP
11.	Pengembangan Kampung Cerdas di Kota Surabaya	Mencakup 6 Pilar utama : 1. Smart governance; 2. Smart branding; 3. Smart economy; 4. Smart living; 5. Smart society; 6. Smart environment						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Pendidikan; 3. Bagian Hukum dan Kerjasama;	Komisi A
12.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan	Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Surya, Permodalan						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	Komisi B

	Daerah Surya	Pasar						2. Badan Pendapatan Daerah. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Bagian Hukum dan Kerjasama.	
13.	Pengendalian dan Penanggulangan Banjir	Kebijakan yang mengatur pengendalian banjir di Kota Surabaya						1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Sosial; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 5. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;	Komisi C

								6. Bagian Hukum dan Kerjasama.	
14.	Perubahan Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Memajukan pendidikan di Kota Surabaya						1. Bagian Hukum dan Kerjasama; 2. Dinas Pendidikan	Komisi D
15.	Hunian Yang Layak	Terkait Bangunan pada penyediaan Rumah Susun						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 5. Bagian Hukum dan Kerjasama; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Lingkungan Hidup.	BPP
16.	Pemajuan Kebudayaan, Keuangan dan	Mengatur, menguatkan dan mengembangkan spirit						1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	BPP

	Kepahlawanan Kota Surabaya							Olah Raga serta Pariwisata; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama	
17.	Perubahan Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	Penataan Reklame, Jaminan Bongkar, pelayanan perijinan penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya	V					1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2. Badan Pendapatan Daerah; 3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga,	Komisi A
18.	Pengelolaan Rumah Susun Komersial di Kota Surabaya	Pengelolaan Rumah Susun Komersial di Kota Surabaya	V					1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Komisi C

								4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 5. Bagian Hukum dan Kerjasama; 6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.	
19.	Ketenagakerjaan	Perlindungan Tenaga Kerja di Surabaya dan mewajibkan setiap perusahaan yang ada di Surabaya memperkerjakan Tenaga kerja lokal Surabaya	V					1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama.	Komisi D
20.	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman	Pengelolaan Fasilitas Umum	V					1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Komisi A

								Permukiman serta Pertanahan.	
21.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Menanggulangi Kemiskinan yang ada di Kota Surabaya	V					1. Dinas Sosial; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama	Komisi D
22.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah di Kota Surabaya						Bagian Hukum dan Kerjasama	BPP
23.	Ijin Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum (RHU)	Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum	V					1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	BPP
24.	Pengelolaan Sampah Medis	Pengelolaan Sampah Medis	V					1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Rumah Sakit Umum Daerah.	BPP
25.	Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	V					1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 3. Dinas Pemberdayaan	Komisi B

								Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	
26.	Penyelenggaraan Angkutan Publik	Penyelenggaraan Angkutan Publik	V					1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Perhubungan.	Komisi C
27.	Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	V			V		1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 3. Badan Pengelolaan	Komisi D

								Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.	
28.	Tempat Hunian Berimbang	Tempat Hunian Berimbang		V				1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.	

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya	Penyesuaian Perangkat Daerah di Kota Surabaya		√			√	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Bagian Organisasi; 3. Bagian Hukum dan Kerjasama	
2.	Penyelenggaraan Transportasi di Kota Surabaya	Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penataan kembali sistem transportasi	√		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	√		Dinas Perhubungan	
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat	Penyesuaian substansi terkait pengelolaan tempat pemakaman		√			√	Dinas Lingkungan Hidup	

	Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, tempat pengabuan (krematorium) dan penyelenggaraan pemakaman jenazah							
4.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Surabaya	✓		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK. 350/5/2017 tentang Obat Hewan	✓		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Revisi 5 tahunan terhadap arahan rencana pola ruang dan struktur ruang utama Kota Surabaya yang dilengkapi dengan arahan peraturan zonasi		✓	Undang-Undang Nomor 26 Tahun Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilakukan peninjauan kembali RTRW paling sedikit		✓	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

					1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun				
6.	Bangunan	Penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan	✓		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja	✓		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
7.	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Surabaya	✓		Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	✓		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

8.	Penanaman Modal	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	✓		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	✓		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Adanya upaya memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat yang permohonannya jumlahnya paling banyak yaitu akta kelahiran, serta		✓	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan,		✓	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

		mempercepat target capaian nasional			<p>Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>				
10.	Pajak dan Retribusi Daerah	Penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	✓		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	✓		<p>1. Badan Pendapatan Daerah</p> <p>2. Bagian Hukum dan Kerjasama</p>	

		antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah							
11.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2020 – 2050	Dokumen Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2020- 2050	✓		1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	✓		Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Rencana Pembangunan Industri Kota Surabaya	Penetapan Rencana Pembangunan Industri	✓		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	✓		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	
13.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	✓		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	✓		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

					<p>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	-	-	-	-	-	-	-	-

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 November 2023

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,
Ttd.
LAILA MUFIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,



Ir. Musdiq Ali Suhudi, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199403 1 006